PENEMUAN HUKUM DALAM PRAKTIK NOTARIAT: MENYIKAPI KEKOSONGAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN ELEKTRONIK DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Mira¹, Bernia Meyta Fredrika²

mierawachdin@gmail.com¹, berniameytaa@gmail.com²

Universitas Pancasila

Abstrak: Kekosongan hukum terkait perjanjian elektronik dalam sistem hukum Indonesia memerlukan peran aktif notaris untuk melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*). Dalam konteks ini, notaris memiliki tanggung jawab memastikan keabsahan dan kekuatan pembuktian perjanjian elektronik melalui interpretasi dan pengembangan praktik kenotariatan. Berdasarkan Pasal 15 UU Jabatan Notaris (UUJN) dan Pasal 5 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dokumen elektronik yang memenuhi persyaratan autentisitas dan integritas memiliki kekuatan hukum. Namun, regulasi spesifik yang mengatur akta elektronik oleh notaris belum tersedia, sehingga pendekatan analogi dan asas kebebasan berkontrak digunakan sebagai panduan. Notaris dapat mengesahkan tanda tangan elektronik dan mencatatkan perjanjian elektronik dalam akta otentik untuk memperkuat validitas dan kekuatan pembuktian dokumen tersebut. Implikasi hukum dari peran ini mencakup perlindungan hukum bagi para pihak, pengakuan yuridis di pengadilan, dan tantangan teknis terkait infrastruktur digital. Selain itu, pendekatan progresif diperlukan untuk mengakomodasi dinamika hukum siber dan perlindungan data pribadi. Dengan dukungan regulasi yang jelas dan peningkatan kompetensi teknis notaris, sistem hukum Indonesia dapat lebih adaptif dalam menghadapi digitalisasi. Kesimpulannya, peran notaris dalam penemuan hukum sangat penting untuk menjamin kepastian hukum perjanjian elektronik di era digital.

Kata kunci: Notaris, Perjanjian Elektronik, Penemuan Hukum.

Abstract: *The legal vacuum regarding electronic agreements in Indonesia's legal system necessitates notaries to engage in legal discovery (*rechtvinding*). In this context, notaries are responsible for ensuring the validity and evidentiary strength of electronic agreements through interpretation and the development of notarial practices. Under Article 15 of the Notary Act (UUJN) and Article 5 of the Electronic Information and Transactions Act (UU ITE), electronic documents that meet authenticity and integrity requirements hold legal force. However, specific regulations on electronic deeds by notaries are absent, prompting the use of analogy and the principle of freedom of contract as guidelines. Notaries can authenticate electronic signatures and record electronic agreements in authentic deeds to enhance the documents' validity and evidentiary strength. The legal implications of this role include legal protection for parties, judicial recognition in court, and technical challenges regarding digital infrastructure. Furthermore, a progressive approach is required to accommodate cyber law dynamics and personal data protection. With clear regulatory support and enhanced technical expertise for notaries, Indonesia's legal system can better adapt to digitalization. In conclusion, the notary's role in legal discovery is crucial to ensuring legal certainty for electronic agreements in the digital era.*

Keywords: Notary, Electronic Agreements, Legal Discovery.

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, kebutuhan akan regulasi hukum yang adaptif dan relevan menjadi hal yang tidak terelakkan. Salah satu fenomena signifikan yang memerlukan perhatian dalam konteks hukum adalah munculnya teknologi digital, khususnya terkait dengan perjanjian elektronik. Teknologi ini telah mengubah cara individu, perusahaan, dan institusi berinteraksi dan membuat kesepakatan. Namun, perkembangan teknologi sering kali melampaui kemampuan hukum untuk mengimbangi, menciptakan apa yang dikenal sebagai *kekosongan hukum* (legal vacuum). Dalam konteks ini, profesi notaris memainkan peran yang strategis karena terlibat langsung dalam proses pengesahan dan perlindungan terhadap berbagai bentuk perjanjian, termasuk yang berbasis elektronik. Sistem hukum Indonesia menganut tradisi hukum sipil (*civil law system*), yang menekankan pentingnya hukum tertulis sebagai sumber hukum utama. Namun, perkembangan teknologi digital memunculkan situasi di mana hukum tertulis tidak selalu dapat memberikan jawaban yang memadai terhadap masalah hukum baru. Salah satu contoh konkrit adalah pengaturan terkait perjanjian elektronik, yang meskipun diatur secara umum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), masih menyisakan sejumlah pertanyaan dan tantangan dalam implementasi praktis. Kekosongan hukum ini menjadi tantangan tersendiri bagi notaris yang harus menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum.¹

Dalam praktik kenotariatan, salah satu tugas utama notaris adalah untuk menjamin keabsahan, kejelasan, dan kekuatan hukum dari suatu perjanjian. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN), notaris berwenang membuat akta autentik yang berfungsi sebagai alat bukti utama dalam sistem hukum perdata Indonesia. Namun, UUJN masih belum memberikan pedoman yang eksplisit mengenai bagaimana notaris harus menyikapi perjanjian yang dibuat secara elektronik. Dalam situasi ini, notaris sering kali dihadapkan pada kebutuhan untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) guna mengisi kekosongan hukum yang ada. Penemuan hukum adalah proses interpretasi dan konstruksi hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, termasuk notaris, untuk memberikan solusi atas suatu masalah hukum yang tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks perjanjian elektronik, penemuan hukum menjadi penting untuk menjawab beberapa pertanyaan kritis, seperti: Apakah perjanjian elektronik dapat dianggap sebagai dokumen autentik? Bagaimana cara memastikan identitas para pihak dalam perjanjian elektronik? Dan apakah tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan konvensional?²

Salah satu tantangan utama dalam menyikapi kekosongan hukum terkait perjanjian elektronik adalah kurangnya harmonisasi antara berbagai regulasi yang relevan. Meskipun UU ITE memberikan dasar hukum untuk validitas perjanjian elektronik dan tanda tangan elektronik, pengaturan ini masih bersifat umum dan memerlukan penjabaran lebih lanjut dalam konteks kenotariatan. Sebagai contoh, Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah, namun tidak memberikan kejelasan apakah dokumen elektronik tersebut dapat dianggap setara dengan akta autentik yang dibuat oleh notaris. Selain itu, peran notaris dalam proses verifikasi identitas para pihak dalam perjanjian elektronik juga menjadi isu yang kompleks. Dalam praktik konvensional, notaris biasanya memeriksa identitas para pihak secara langsung dengan menggunakan dokumen identitas resmi seperti KTP atau paspor. Namun, dalam perjanjian elektronik, verifikasi identitas sering kali dilakukan secara daring, yang dapat membuka celah bagi potensi

¹ Ahmad, F. (2018). Keabsahan Kuasa Untuk Menandatangani Akta Oleh Lembaga Pembiayaan Jaminan Fidusia Suatu Kajian Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015. *Jurnal Ius Constituendum*, 3(2), 147-165.

² Maulidiyah, R. F. (2020). *Analisis Yuridis Terhadap Cyber Notary Dalam Perkembangan Hukum Kenotariatan Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Malang).

penyalahgunaan atau pemalsuan data. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana notaris dapat bertanggung jawab atas keabsahan identitas para pihak dalam perjanjian elektronik.

Penemuan hukum menjadi pendekatan yang esensial untuk mengatasi kekosongan hukum dalam pengaturan perjanjian elektronik. Dalam teori hukum, penemuan hukum dapat dilakukan melalui beberapa metode, antara lain interpretasi hukum, analogi hukum, dan penemuan hukum progresif. Interpretasi hukum melibatkan penafsiran terhadap ketentuan hukum yang sudah ada untuk menjawab permasalahan hukum yang spesifik. Misalnya, notaris dapat menginterpretasikan ketentuan dalam UUJN mengenai akta autentik untuk mencakup dokumen elektronik yang telah dilengkapi dengan tanda tangan elektronik yang tersertifikasi. Pendekatan analogi hukum juga dapat digunakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku untuk perjanjian konvensional dan menerapkannya pada perjanjian elektronik. Misalnya, prinsip kesepakatan para pihak (*consensus*) dan kejelasan objek perjanjian (*certain object*) yang berlaku untuk perjanjian tertulis dapat dijadikan acuan untuk menilai keabsahan perjanjian elektronik. Penemuan hukum progresif, di sisi lain, menuntut notaris untuk mengambil langkah-langkah inovatif dalam menemukan solusi hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Dalam konteks ini, notaris dapat memanfaatkan teknologi seperti *blockchain* untuk memastikan integritas dokumen elektronik dan identitas para pihak. Dengan demikian, penemuan hukum tidak hanya berfungsi untuk mengisi kekosongan hukum, tetapi juga untuk mendorong pembaruan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.³

Kajian mengenai penemuan hukum dalam praktik notariat terhadap kekosongan hukum terkait perjanjian elektronik memiliki signifikansi yang luas, baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, kajian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam memahami dinamika penemuan hukum dalam sistem hukum sipil. Secara praktis, kajian ini dapat menjadi panduan bagi notaris dalam menjalankan tugasnya di era digital, sekaligus memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan regulasi yang lebih komprehensif. Lebih lanjut, kajian ini juga relevan dalam konteks global, mengingat perjanjian elektronik telah menjadi praktik umum di banyak negara. Dalam beberapa yurisdiksi, seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, regulasi mengenai perjanjian elektronik telah berkembang pesat, memberikan kerangka hukum yang jelas dan mendukung penerapan teknologi digital dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan demikian, kajian ini juga dapat menjadi acuan bagi Indonesia dalam mengembangkan regulasi yang sejalan dengan standar internasional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kekosongan hukum yang ada dalam pengaturan perjanjian elektronik di Indonesia, serta mengeksplorasi bagaimana notaris dapat melakukan penemuan hukum untuk mengatasi kekosongan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung pengembangan hukum kenotariatan yang lebih adaptif terhadap perubahan teknologi. Dengan fokus pada isu-isu kritis seperti validitas dokumen elektronik, kekuatan hukum tanda tangan elektronik, dan peran notaris dalam verifikasi identitas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjawab tantangan hukum yang dihadapi dalam praktik kenotariatan di era digital.

METODE PENELITIAN

Dalam tulisan ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode penelitian hukum yuridis normatif adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian ini bersifat teoretis dan bertujuan untuk mengkaji secara mendalam prinsip-prinsip hukum yang

³ Anggriani, S., Firdaus, R. S., & Suherlan, W. A. S. (2023). Analisis Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik. *Notaire*, 6(3).

tertuang dalam peraturan tertulis, sehingga metode ini sering disebut sebagai *doctrinal research*. Dalam konteks ini, objek kajian utama adalah teks-teks hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, maupun yurisprudensi yang relevan. Penelitian yuridis normatif sering digunakan untuk memahami, menafsirkan, atau menguji keberlakuan suatu aturan hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum tertentu.

Proses dalam metode yuridis normatif melibatkan beberapa tahap penting. Tahap pertama adalah pengumpulan bahan hukum, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, yang menjadi dasar otoritatif dalam analisis hukum. Bahan hukum sekunder mencakup pendapat ahli hukum, doktrin, dan literatur hukum lainnya yang mendukung analisis. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi referensi pendukung seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Tahap kedua adalah analisis bahan hukum, yang dilakukan melalui metode interpretasi. Interpretasi ini dapat berbentuk gramatikal, sistematis, historis, atau teleologis, bergantung pada tujuan dan konteks penelitian. Penelitian hukum yuridis normatif berorientasi pada pengembangan argumen hukum yang logis dan sistematis. Dalam praktiknya, metode ini sering digunakan untuk menganalisis kekosongan hukum (*legal vacuum*), konflik norma, atau penerapan prinsip hukum tertentu. Misalnya, dalam penelitian yang mengkaji validitas tanda tangan elektronik dalam perjanjian, pendekatan yuridis normatif dapat digunakan untuk membandingkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan prinsip-prinsip hukum kontrak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Notaris Dalam Melakukan Penemuan Hukum Untuk Mengisi Kekosongan Hukum Terkait Perjanjian Elektronik Dalam Sistem Hukum Indonesia

Kekosongan hukum dalam pengaturan perjanjian elektronik di Indonesia menjadi tantangan yang memerlukan peran aktif notaris sebagai pejabat umum. Dalam sistem hukum Indonesia, notaris bertugas memberikan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum melalui akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Dengan berkembangnya teknologi informasi, muncul kebutuhan untuk mengakomodasi dokumen elektronik dan perjanjian elektronik ke dalam praktik notaris. Namun, pengaturan hukum yang secara spesifik mengatur peran notaris terhadap perjanjian elektronik masih terbatas, sehingga memerlukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh notaris untuk mengisi kekosongan tersebut. Penemuan hukum oleh notaris dalam konteks perjanjian elektronik dilakukan dengan mengacu pada asas-asas hukum dan kaidah normatif yang berlaku. Salah satu dasar hukum yang relevan adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengakui bahwa dokumen elektronik memiliki kekuatan hukum yang setara dengan dokumen konvensional, selama memenuhi persyaratan autentikasi dan integritas sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (4). Namun, pengaturan ini tidak secara eksplisit mengatur bagaimana peran notaris dalam memvalidasi perjanjian elektronik, sehingga notaris perlu melakukan interpretasi hukum berdasarkan kaidah hukum umum dan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).⁴

Dalam praktiknya, notaris dapat melakukan penemuan hukum dengan menerapkan prinsip analogi, yaitu mengaitkan pengaturan yang sudah ada pada perjanjian konvensional ke dalam konteks perjanjian elektronik. Sebagai contoh, notaris dapat menggunakan Pasal 1868 KUH Perdata

⁴ Mallolongan, L. N., & Noor, H. J. (2023). Peluang Penerapan Penyimpanan Minuta Akta secara Elektronik menuju Era E-Notary berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. *Notary Law Journal*, 2(1), 54-81.

tentang akta otentik sebagai rujukan untuk memastikan bahwa perjanjian elektronik yang dibuat memiliki unsur-unsur autentisitas, integritas, dan kekuatan pembuktian. Dengan pendekatan ini, notaris dapat menyusun akta otentik yang mendokumentasikan perjanjian elektronik atau memberikan pengesahan terhadap tanda tangan elektronik yang digunakan dalam perjanjian tersebut. Selain itu, notaris perlu memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang mengatur mengenai sertifikat elektronik dan penyelenggaraan tanda tangan elektronik. Pasal 59 ayat (3) peraturan ini menyatakan bahwa tanda tangan elektronik tersertifikasi memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Dalam hal ini, notaris dapat bekerja sama dengan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) yang diakui oleh pemerintah untuk memastikan keabsahan dan keamanan tanda tangan elektronik yang digunakan dalam perjanjian. Dengan demikian, notaris dapat menjembatani kebutuhan hukum masyarakat terhadap perjanjian elektronik yang sah dan berkekuatan hukum.⁵

Peran notaris dalam penemuan hukum juga mencakup pengembangan praktik kenotariatan melalui pendekatan progresif. Dalam konteks ini, notaris dituntut untuk memahami dinamika hukum siber (cyber law) dan aspek teknis dari transaksi elektronik. Penemuan hukum oleh notaris tidak hanya didasarkan pada peraturan yang ada, tetapi juga pada pemikiran hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sebagai contoh, notaris dapat merumuskan klausul-klausul dalam perjanjian elektronik yang mencakup aspek perlindungan data pribadi, keamanan transaksi, dan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis elektronik. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip kebaruan hukum (legal innovation) yang bertujuan untuk memberikan solusi hukum yang relevan dengan perkembangan teknologi. Namun, peran notaris dalam penemuan hukum terhadap perjanjian elektronik tidak terlepas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah ketiadaan regulasi khusus yang mengatur akta elektronik dalam lingkup UUJN. Dalam kondisi ini, notaris harus berhati-hati agar interpretasi hukumnya tidak bertentangan dengan asas legalitas. Tantangan lainnya adalah keterbatasan infrastruktur teknologi yang mendukung pelaksanaan perjanjian elektronik, terutama dalam hal autentikasi dan penyimpanan dokumen elektronik secara aman. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih spesifik, seperti revisi UUJN untuk mengakomodasi akta elektronik, serta peningkatan kapasitas notaris dalam penggunaan teknologi informasi.⁶

Dari perspektif praktis, peran notaris dalam penemuan hukum untuk mengisi kekosongan hukum terkait perjanjian elektronik harus bersifat kolaboratif. Notaris dapat berperan sebagai mediator antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian elektronik untuk memastikan bahwa semua ketentuan hukum terpenuhi dan dokumen yang dihasilkan memiliki kekuatan pembuktian yang sah. Selain itu, notaris juga dapat berfungsi sebagai konsultan hukum yang memberikan edukasi kepada masyarakat tentang validitas perjanjian elektronik dan pentingnya penggunaan tanda tangan elektronik yang tersertifikasi. Dengan demikian, notaris tidak hanya bertugas sebagai pembuat akta, tetapi juga sebagai pengawal perkembangan hukum di era digital. Ke depan, peran notaris dalam pengaturan perjanjian elektronik harus didukung oleh pembaruan hukum yang lebih komprehensif. Salah satu rekomendasi adalah penyusunan peraturan pemerintah atau peraturan menteri yang secara khusus mengatur prosedur dan mekanisme pelaksanaan akta elektronik oleh notaris. Regulasi ini harus mencakup aspek teknis, seperti spesifikasi tanda tangan elektronik yang diakui, mekanisme pengamanan data, dan syarat validitas akta elektronik. Dengan adanya regulasi yang lebih jelas, notaris dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dalam memberikan perlindungan hukum

⁵ Bakry, M. R., & Yusuf, C. (2024). Keberlakuan Pemberian Uang Panjar Berdasarkan Hukum Adat Analisis Perjanjian Jual Beli Tanah Yang Dapat Membatalkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dan Surat Kuasa Menjual Yang Dibuat Oleh Notaris. *JOSH: Journal of Sharia*, 3(01), 19-28.

⁶ Restu, A. S. D. (2024). *Cyber notary di indonesia ditinjau dari peraturan perundang-undangan di era digitalisasi* (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).

kepada para pihak dalam perjanjian elektronik.

Selain pembaruan regulasi, penting pula untuk meningkatkan kompetensi notaris dalam memahami teknologi informasi dan hukum siber. Program pelatihan dan sertifikasi khusus bagi notaris tentang pengelolaan dokumen elektronik dan penggunaan tanda tangan elektronik dapat menjadi langkah strategis. Program ini dapat diselenggarakan oleh organisasi profesi notaris, seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI), bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga teknologi informasi. Dengan demikian, notaris dapat berperan secara optimal dalam memberikan solusi hukum terhadap perjanjian elektronik di Indonesia. Dalam kesimpulannya, peran notaris dalam melakukan penemuan hukum untuk mengisi kekosongan hukum terkait perjanjian elektronik sangatlah penting untuk menjamin kepastian hukum di era digital. Penemuan hukum oleh notaris dilakukan melalui pendekatan normatif, interpretasi hukum, dan pengembangan praktik kenotariatan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Meskipun menghadapi tantangan regulasi dan teknologi, notaris tetap dapat berkontribusi secara signifikan dalam membangun sistem hukum yang adaptif dan progresif. Oleh karena itu, dukungan regulasi yang jelas, peningkatan kapasitas notaris, dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan menjadi kunci untuk mengoptimalkan peran notaris dalam pengaturan perjanjian elektronik di Indonesia.

Implikasi Hukum Dari Penemuan Hukum Oleh Notaris Terhadap Validitas Dan Kekuatan Pembuktian Perjanjian Elektronik Dalam Praktik Kenotariatan Di Indonesia

Penemuan hukum oleh notaris memiliki implikasi hukum yang signifikan terhadap validitas dan kekuatan pembuktian perjanjian elektronik dalam praktik kenotariatan di Indonesia. Sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, notaris berperan penting dalam menjamin keabsahan dokumen, termasuk perjanjian elektronik, yang semakin berkembang seiring digitalisasi. Validitas dan kekuatan pembuktian suatu perjanjian elektronik akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana notaris menafsirkan dan menerapkan kaidah hukum yang berlaku dalam kondisi kekosongan hukum. Hal ini penting, mengingat perjanjian elektronik merupakan bentuk kontrak yang menggunakan media digital dan teknologi informasi, yang diatur secara parsial dalam berbagai regulasi. Secara normatif, validitas perjanjian elektronik diakui dalam sistem hukum Indonesia berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah selama memenuhi persyaratan integritas dan autentisitas. Untuk memenuhi persyaratan ini, dokumen elektronik harus dapat diakses, ditampilkan ulang tanpa perubahan, dan memenuhi standar autentikasi melalui tanda tangan elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU ITE. Namun, tidak ada ketentuan eksplisit yang mengatur peran notaris dalam proses validasi ini, sehingga notaris harus melakukan penemuan hukum dengan menggunakan asas-asas umum hukum perdata dan kaidah kenotariatan.⁷

Implikasi utama dari penemuan hukum oleh notaris dalam hal ini adalah bahwa notaris dapat membantu memperkuat validitas perjanjian elektronik dengan mengesahkan tanda tangan elektronik para pihak atau dengan mencatat perjanjian elektronik dalam akta notaris. Dalam praktik kenotariatan, akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dengan demikian, jika perjanjian elektronik dicatatkan dalam akta otentik oleh notaris, dokumen tersebut akan memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan dokumen fisik. Proses ini juga memberikan kepastian hukum kepada para pihak terkait keberlakuan perjanjian elektronik tersebut. Namun, penemuan hukum oleh notaris dalam praktik ini juga menimbulkan beberapa implikasi hukum lainnya, terutama terkait dengan integrasi tanda tangan elektronik dan autentisitas dokumen elektronik. Tanda tangan elektronik yang

⁷ Savira, K., & Ahlan, S. F. (2022). Efektivitas Sistem Barcode Dalam Pengamanan Akta Autentik. *Jurnal USM Law Review*, 5(1), 157-171.

digunakan dalam perjanjian elektronik harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 59 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang mengharuskan tanda tangan elektronik tersertifikasi oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE). Apabila notaris gagal memastikan bahwa tanda tangan elektronik yang digunakan telah tersertifikasi, maka validitas dokumen elektronik tersebut dapat dipertanyakan, yang pada akhirnya memengaruhi kekuatan pembuktiannya.⁸

Selain itu, penemuan hukum oleh notaris dalam hal ini juga berimplikasi pada pengakuan yuridis terhadap dokumen elektronik yang dijadikan alat bukti di pengadilan. Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa alat bukti meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dokumen elektronik, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU ITE, dapat dianggap sebagai surat dalam konteks ini. Akan tetapi, keabsahan dokumen elektronik di pengadilan bergantung pada integritas dan autentisitasnya. Dengan adanya keterlibatan notaris dalam mencatat atau mengesahkan dokumen elektronik, maka kekuatan pembuktian dokumen tersebut dapat diperkuat, sehingga mempermudah hakim dalam menilai keabsahan alat bukti tersebut. Lebih jauh, implikasi hukum dari penemuan hukum oleh notaris terhadap validitas dan kekuatan pembuktian perjanjian elektronik juga mencakup aspek perlindungan hukum bagi para pihak. Dalam praktiknya, para pihak dalam perjanjian elektronik sering kali menghadapi risiko terkait keabsahan dokumen, seperti pemalsuan tanda tangan elektronik atau manipulasi isi dokumen. Dengan adanya campur tangan notaris melalui penemuan hukum, para pihak dapat memperoleh perlindungan hukum yang lebih baik. Notaris dapat bertindak sebagai pihak ketiga yang independen untuk memastikan bahwa perjanjian elektronik dibuat berdasarkan persetujuan bebas para pihak dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁹

Namun, implikasi hukum dari penemuan hukum oleh notaris tidak selalu positif. Dalam kondisi kekosongan hukum, penemuan hukum oleh notaris dapat menimbulkan risiko penyimpangan atau interpretasi hukum yang berbeda-beda. Sebagai contoh, jika terdapat perbedaan penafsiran mengenai standar autentikasi dokumen elektronik atau keabsahan tanda tangan elektronik, maka hasil penemuan hukum oleh notaris dapat diperdebatkan di pengadilan. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang bergantung pada peran notaris dalam memperkuat keabsahan perjanjian elektronik mereka. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meminimalkan risiko tersebut melalui pembaruan regulasi yang lebih komprehensif. Salah satu rekomendasi adalah revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) untuk mencakup pengaturan tentang akta elektronik dan peran notaris dalam memvalidasi dokumen elektronik. Selain itu, pengembangan pedoman teknis bagi notaris dalam menangani perjanjian elektronik juga menjadi hal yang mendesak. Pedoman ini dapat mencakup prosedur validasi dokumen elektronik, verifikasi tanda tangan elektronik, dan pengelolaan arsip elektronik secara aman. Dalam konteks internasional, praktik penemuan hukum oleh notaris di Indonesia dapat dibandingkan dengan pendekatan yang diambil oleh negara-negara lain. Sebagai contoh, beberapa negara Eropa telah mengadopsi sistem e-notariat, di mana notaris berwenang untuk membuat akta elektronik yang diakui secara hukum. Model ini dapat menjadi inspirasi bagi Indonesia dalam mengembangkan regulasi dan praktik kenotariatan yang lebih adaptif terhadap era digital. Pada akhirnya, implikasi hukum dari penemuan hukum oleh notaris terhadap validitas dan kekuatan pembuktian perjanjian elektronik bergantung pada sejauh mana regulasi dan praktik kenotariatan mampu mengakomodasi perubahan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Dengan pendekatan yang tepat, peran notaris dapat memberikan kontribusi besar dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum di era

⁸ Mulyawan, B., & Hukum, K. (2018). Kekuatan Alat Bukti Informasi Elektronik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(1), 107-118.

⁹ Putri, A. A. (2020). Analisis Konflik Hukum Dan Simulasi Pernyataan Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Pendiri Tunggal. *Indonesian Notary*, 2(4), 38.

digital. Hal ini sekaligus mengukuhkan notaris sebagai pilar penting dalam sistem hukum Indonesia yang terus berkembang.

KESIMPULAN

Kekosongan hukum terkait pengaturan perjanjian elektronik di Indonesia menempatkan notaris pada posisi strategis dalam melakukan penemuan hukum untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Peran notaris menjadi penting dalam menjembatani kebutuhan hukum modern dengan menggunakan asas-asas hukum yang berlaku, seperti asas kebebasan berkontrak dan kaidah kenotariatan, serta melakukan interpretasi normatif atas regulasi seperti UU ITE dan KUH Perdata. Penemuan hukum ini memungkinkan notaris untuk memperkuat validitas dan kekuatan pembuktian perjanjian elektronik melalui akta otentik, meskipun dihadapkan pada tantangan regulasi dan infrastruktur teknologi yang terbatas. Secara keseluruhan, peran notaris dalam konteks ini memberikan kontribusi signifikan bagi adaptasi hukum Indonesia terhadap perkembangan teknologi informasi, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum di era digital. Pemerintah perlu menyusun regulasi khusus, seperti revisi UUJN atau peraturan teknis lainnya, untuk mengakomodasi akta elektronik. Regulasi ini harus mencakup prosedur, persyaratan autentikasi, dan mekanisme penyimpanan dokumen elektronik secara aman. Ikatan Notaris Indonesia (INI) bersama pemerintah harus menyelenggarakan program pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi notaris dalam bidang teknologi informasi dan hukum siber, termasuk pengelolaan dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, F. (2018). Keabsahan Kuasa Untuk Menandatangani Akta Oleh Lembaga Pembiayaan Jaminan Fidusia Suatu Kajian Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015. *Jurnal Ius Constituendum*, 3(2), 147-165.
- Maulidiyah, R. F. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Cyber Notary Dalam Perkembangan Hukum Kenotariatan Di Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Islam Malang).
- Anggriani, S., Firdaus, R. S., & Suherlan, W. A. S. (2023). Analisis Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik. *Notaire*, 6(3).
- Mallolongan, L. N., & Noor, H. J. (2023). Peluang Penerapan Penyimpanan Minuta Akta secara Elektronik menuju Era E-Notary berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. *Notary Law Journal*, 2(1), 54-81.
- Bakry, M. R., & Yusuf, C. (2024). Keberlakuan Pemberian Uang Panjar Berdasarkan Hukum Adat Analisis Perjanjian Jual Beli Tanah Yang Dapat Membatalkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dan Surat Kuasa Menjual Yang Dibuat Oleh Notaris. *JOSH: Journal of Sharia*, 3(01), 19-28.
- Restu, A. S. D. (2024). Cyber notary di indonesia ditinjau dari peraturan perundang-undangan di era digitalisasi (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).
- Savira, K., & Ahlan, S. F. (2022). Efektivitas Sistem Barcode Dalam Pengamanan Akta Autentik. *Jurnal USM Law Review*, 5(1), 157-171.
- Putri, A. A. (2020). Analisis Konflik Hukum Dan Simulasi Pernyataan Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Pendiri Tunggal. *Indonesian Notary*, 2(4), 38.
- Deeds, O. A. (2022). Efektivitas Sistem Barcode Dalam Pengamanan Akta Autentik. *Jurnal USM Law Review Vol*, 5(1).
- Mulyawan, B., & Hukum, K. (2018). Kekuatan Alat Bukti Informasi Elektronik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(1), 107-118.